

# **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA LUMBOK KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Septi Wulandari**

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

Email : [Wulandarisepti@gmail.com](mailto:Wulandarisepti@gmail.com)

## ***Abstract***

*This research was conducted in Lumbok Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the Community Development Implementation carried out by the Lumbok Village government, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for the elements of the Lumbok Village apparatus because of the relatively small number of 6 people, then the determination of the sample using the saturated sampling method, ie all the pupils are sampled. For community elements using the Random Sampling method the method of sampling from the population is done randomly without regard to strata in the population, the number of samples using the Slovin formula is obtained by 41 people, the total respondents in this study amounted to 47 respondents. Based on the results of the distribution of questionnaires that have been carried out on the Implementation of Community Development carried out by the Lumbok village government, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency, which produces an average value of 2.55, it means that it is in the Intermediate Interval. Which means that the Implementation of Community Development in the Lumbok Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency has not been implemented properly.*

**Keywords: Implementation of Community Development**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan pemerintah Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk unsur Perangkat Desa Lumbok karena jumlahnya relatif kecil yakni 6 orang, maka penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel. Untuk unsur masyarakat menggunakan metode Random Sampling metode pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, yang jumlah pengambilan sampelnya menggunakan rumus slovin yakni didapat 41 orang, total responden pada penelitian ini berjumlah 47 responden. Berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Implementasi Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan pemerintah Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 2,55 berarti berada pada interval Kurang Baik. Yang artinya Implementasi Pembinaan Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Belum Terimplementasi Dengan Baik*

**Keywords: Implementasi Pembinaan Masyarakat**

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui upaya-upaya pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dimana melalui peningkatan sumber daya manusia Indonesia diharapkan mampu memberikan perubahan positif dalam berbagai dimensi kehidupan dan dalam berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal ini, perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam konteks pembangunan ialah perubahan yang berlangsung secara nasional.

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Paradigma pemberdayaan memberikan arti penting dalam membangkitkan potensi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan melalui proses belajar bersama yang berbasis pada budaya, politik, dan ekonomi lokal. Keberagaman Bangsa Indonesia tak dapat dikelola dengan baik secara sentralistik dalam pemerintahan. Untuk itu pemerintah daerah seyogyanya merealisasikan potensi kearifan lokal yang disesuaikan dengan etika dan budaya lokal, tanpa menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) 2014-2019 Desa lumbok. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2018 melaksanakan 3 jenis kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah desa yaitu :

1. Kegiatan pembinaan posyandu
2. Kegiatan pembinaan PKK
3. Kegiatan pembinaan guru ngaji

Kegiatan pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti kegiatan posyandu Kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Kegiatan ini harus nya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Posyandu merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat lumbok di bidang

kesehatan dengan penanggung jawab tertinggi kepala desa. Beberapa kegiatan di Posyandu diantaranya terdiri dari lima kegiatan Posyandu (Panca Krida Posyandu), antara lain :

1. Kesehatan Ibu dan Anak
2. Keluarga Berencana
3. Immunisasi
4. Peningkatan gizi
5. Penanggulangan Diare

Kegiatan posyandu di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ini belum optimal dalam pelaksanaannya, selain kegiatan dilakukan hanya sebulan sekali, bahkan terkadang lebih dari sebulan, dan posyandu di Desa Lumbok belum melaksanakan seluruh kegiatan posyandu tersebut secara optimal, yang paling terlihat dari kegiatan posyandu di desa lumbok ini hanya peningkatan gizi, itupun peningkatan gizi pada balita saja dengan menimbang berat badan bayi, lalu memberi makan tambahan yang mengandung protein dan kalori untuk balita. Sedangkan kegiatan lainnya boleh dikatakan sekedarnya saja, seperti kegiatan immunisasi, kegiatan immunisasi sangat kurang peminatnya, karena ibu-ibu yang memiliki ekonomi menengah ke atas lebih memilih immunisasi ke Klinik terpercaya yang mereka nilai lebih dibanding ke posyandu, meskipun pada dasarnya sama saja. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat posyandu dan kurangnya dukungan serta motivasi dari kader posyandu dan tokoh masyarakat yang membuat kurangnya antusias warga dalam kegiatan pembinaan masyarakat melalui posyandu.

Sama halnya dengan kegiatan posyandu yang kurang optimal, begitu juga dengan kegiatan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), bahkan program PKK dinilai lebih parah, dikarenakan dari keterangan beberapa warga semua mengatakan hak ada PKK di desa ini, padahal PKK memiliki 10 program pokok yaitu :

1. Penghayatan dan pengamalan pancasila,
2. Gotong royong,
3. Pangan,
4. Sandang,
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga,
6. Pendidikan dan Keterampilan,
7. Kesehatan,
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi,
9. Kelestarian Lingkungan Hidup,
10. Perencanaan Sehat

Dari 10 program pokok PKK, namun kegiatan yang dilakukan ibu-ibu PKK di desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang hanya Gotong royong, itupun dilakukan pada acara-acara tertentu seperti menyambut bulan suci ramadhan, musyawarah desa dan pada saat melakukan doa padang (doa yang dilakukan sebelum menenam padi di sawah). Pada intinya desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang tidak melaksanakan seluruh program pokok PKK ini, seharusnya banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan menjadi kegiatan rutin ibu-ibu PKK, namun tidak dijadikan kegiatan rutin oleh PKK di desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Bagitu juga dengan kegiatan guru mengaji anak, kegiatan didikan shubuh pada awalnya cukup baik, rutin dilakukan setiap minggu pagi, namun sekarang anak-anak kurang antusiasnya mengikuti didikan shubuh dan anak-anak sudah berkurang untuk mengaji setelah maghrib di mushola-mushola, sepertinya dikatakan guru ngaji yang bernama Elriadi yang peneliti wawancarai, “mungkin dikarenakan perkembangan zaman, anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu”. Pendapat tersebut ada benarnya, Namun peneliti menilai kegiatan yang dilaksanakan begitu-begitu saja hingga perlu inovasi agar anak

menjadi antusias dalam kegiatan ini, seperti perlu diadakan perlombaan-perlombaan kecil untuk meningkatkan antusias anak, namun kegiatan ini tidak mungkin terlaksana sebatas di laksanakan oleh guru ngaji saja yang mayoritas sudah tua, tentunya dengan dukungan pemerintah desa serta orang tua anak.

Dilihat dari beberapa program kegiatan pembinaan yang ada di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi tersebut belum optimal, seharusnya banyak kegiatan pembinaan lain nya yang bisa di lakukan, dilaksanakan seluruh kegiatan pembinaan seluruh dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh kapasitas implementor yang kurang memadai seperti ketua program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang kurang memahami mengenai apa-apa saja program dari PKK, dan kurang memahami mengenai tugas-tugasnya, dan kurang jelasnya kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga tidak optimal nya kegiatan pembinaan ini

Berdasarkan Hasil Observasi terlihat bahwa belum maksimalnya Implementasi Program Pembinaan Masyarakat Desa Lumbok ini. Diduga Diduga Program Pembinaan Masyarakat didesa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum Terimplementasi, penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan pemerintah Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Administrasi Negara**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan administrasi. Administrasi merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan.

Kata *Administrasi* juga berasal dari bahasa Belanda dari kata *administratie* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tatausaha), dan *beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personal, gudang).

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama-sama. (Suprayogi, 2011 : 2)

Menurut Edward H. Lichfield (dalam Syafii 2003:33) bahwa Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai,

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (unavoidable). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.
- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- e. Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.
- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
2. Adanya kerjasama.
3. Adanya proses usaha.
4. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.
5. Adanya tujuan.

Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009:21)

fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*)

## **2.2 Teori Implementasi**

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. (Syaukani dkk, 2004 : 295)

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Di Indonesia sendiri telah banyak contoh kegagalan implementasi kebijakan maupun program. Kegagalan implementasi yang terjadi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kegagalan yang ditemukan di negara lain. Setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu : (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 85-87)

1. Kualitas kebijakan itu sendiri yaitu kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Kualitas kebijakan juga ditentukan oleh proses perumusan kebijakan, apakah kebijakan tersebut dirumuskan secara demokratis atau tidak.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan bisa mencapai tujuan atau sasarannya tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Secara hipotesis bisa dirumuskan bahwa semakin besar anggaran yang diperuntukkan bagi suatu kebijakan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis akan menghambat proses kebijakan.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. Karakteristik kelompok sasaran akan sangat mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi kebijakan dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi:

Pandangan Edwards III dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 85) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya

finansial.sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

### 2.3 Teori Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan. (Tanzeh, 2009 : 144)

Pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. (Ivancevich, 2008 : 46)

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian (pelaksanaan), dan pengendalian (monitoring dan evaluasi). (Fattah, 2009 : 49)

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.( Rivai dan Sagala, 2013 :13).

#### a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan

#### b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan

organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif

c. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

## **2.4 Pemberdayaan Masyarakat**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

*Empowerment* atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat terutama Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57).

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. (Suhendra, 2006:74-75)

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain. (Moh. Ali Aziz dkk, 2005 : 169)

## **2.5 Teori Desa**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PP No 6 Tahun 2014)

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. (KBBI, 2013 : 2)

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah

untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

### **2.6 Teori Pemerintahan Desa**

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2)

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desam

- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3) :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 4) :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

## 2.7 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012)

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Pembinaan Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 2,55 berarti berada pada interval Kurang Baik. Berarti Implementasi Pembinaan Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum terimplementasi dengan baik. Yang artinya Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum melaksanakan Pembinaan Masyarakat dengan baik. Hal ini dikarenakan dari 6 indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kualitas kebijakan, Kecukupan input kebijakan, Ketepatan instrument, Kapasitas implementor, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, Kondisi lingkungan dari hasil sebaran kuesioner hampir seluruhnya Kurang Baik.

Indikator Kualitas Kebijakan untuk diimplementasikan sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 2,52 yang berada pada interval Kurang Baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami apa-apa saja sebenarnya yang menjadi program pembinaan masyarakat di desa lumbok ini, menyebutkan tidak jelasnya siapa pelaksana pembinaan masyarakat, program-program apa masyarakat tidak mengetahui dan memahami apalagi siapa pelaksananya, menyebutkan tidak jelas nya siapa pelaksana, siapa-siapa yang ditunjukkan menjadi penanggung jawab dari program-program yang ada di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Indikator Kecukupan Input Kebijakan untuk implementasi sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 2,45 yang berada pada interval Kurang Baik, Hal ini dapat dilihat dengan dana yang disediakan oleh pemertintah desa yang diperuntukkan untuk setiap kegiatan pembinaan masyarakat pada Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi sangat terbatas, dan dengan kurang lengkap dan jelasnya siapa-siapa yang menjadi pelaksana dari program-program pembinaan masyarakat yang ada di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini lah yang menjadi penyebab utama program-program didesa lumbok tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sangat sedikit dana yang diberikan desa untuk menjalankan program-program yang ada di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi ini.

Indikator Ketepatan Instrumen untuk implementasi sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 2,51 yang berada pada interval Kurang Baik. Hal ini dapat dilihat dengan kurang jelasnya siapa implementor atau pelaksana yang harus memberikan

pelayanan yang baik dalam setiap pelaksanaan program pembinaan masyarakat pada Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, dan ditunjukkan dengan sedikitnya dana yang diperuntukkan untuk kegiatan pembinaan masyarakat pada Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Indikator Kapasitas Implementor untuk implementasi sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 2,42 yang berada pada interval Kurang Baik. Hal ini ditunjukkan dengan kurang lengkapnya struktur organisasi, siapa-siapa pelaksana Pembinaan Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan program pembinaan, serta menurut masyarakat pelaksana yang ditunjuk berdasarkan kedekatan tanpa melihat kualitas sumber daya untuk melaksanakan program pembinaan masyarakat pada Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi ini, dan ditunjukkan dengan kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan program pembinaan ini, bagaimana bisa saling berkordinasi bila kurangnya siapa-siapa yang tertera distruktur organisasi sebagai pelaksana untuk melaksanakan program pembinaan masyarakat pada Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi ini.

Indikator Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran dalam implementasi sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 2,52 yang berada pada interval Kurang Baik. Hal ini ditunjukkan dengan cukup banyak masyarakat yang enggan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembinaan di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, dan dengan kurangnya dukungan dari kelompok sasaran Pembinaan Masyarakat, setiap kegiatan kurang ramai dihadiri oleh kelompok sasaran program pembinaan masyarakat pada Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Indikator Kondisi Lingkungan dalam implementasi sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 2,91 yang berada pada interval Cukup Baik. Hal ini ditunjukkan dengan cukup tentramnya kondisi sosial di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi ekonomi masyarakat yang cukup baik pada Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, dan dengan baiknya kondisi lingkungan politik, tidak adanya konflik yang didasari politik di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Pembinaan Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 2,55 berarti berada pada interval Kurang Baik. Berarti Implementasi Program Pembinaan Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum terimplementasi dengan baik. Yang artinya Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum melaksanakan Pembinaan Masyarakat dengan baik. Hal ini dikarenakan dari 6 indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kualitas kebijakan, Kecukupan input kebijakan, Ketepatan instrument, Kapasitas implementor, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, Kondisi lingkungan dari hasil sebaran kuesioner hampir seluruhnya Kurang Baik.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang tiada henti untuk Ayahanda dan Ibunda dan Suami tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta

pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat menjalani hidup dan terima kasih kepada Abang dan Adikku tersayang yang juga telah memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani study, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing I, Bapak Emilia Emharis,S.Sos.,M.Si Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode penelitian*. Yogyakarta: Teras
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara
- Departemen Pendidikan Nasional (2013) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansyah, Tantan dkk 2009, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, Jakarta,UIN Jakarta Press
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga
- Kartasmita Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brwajiya ; Bandung
- Mardikanto, 2010. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit TS, Surakarta
- Moleong , Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nanang Fattah, 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Siagian P, Sondang, 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT Refika Aditama)
- Suhendra, K, 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Surmayadi, Nyoman. I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama.
- Syafii, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* . Bandung: PT Bumi Aksara.
- Syaukani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Usman Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa